

LAPORAN SURVEI IPAK & IPKP BULAN **JANUARI** TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, maka dalam rangka menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, maka dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka penyelenggara layanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui **Survey Kepuasan Layanan/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)** dan **Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani. DPKP merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat terkait pelayanan di lingkungannya. ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

II. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Anti Korupsi meliputi :

No.	Variabel
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin
2	Praktek Percaloan
3	Diskrimasi dalam pelayanan
4	Praktek pungli
5	Mal-administrasi

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

B. Hasil Survei

NO	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPAK	Kinerja
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin	3,00			
2	Praktek Percaloan	3,00			
3	Diskriminasi dalam pelayanan	3,00		NIHIL	
4	Praktek pungli	3,00			
5	Mal-administrasi	3,00			
	Total Bobot / Rata-rata	15,00			

C. Analisis

-

III. INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Kualitas Pelayanan meliputi :

No	Variabel
1	Persyaratan Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Waktu dalam Pelayanan
4	Biaya/ tarif Pelayanan
5	Standar Pelayanan
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Hasil Survei

No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPKP	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,00			
2	Prosedur Pelayanan	3,00			
3	Waktu dalam Pelayanan	2,00			
4	Biaya/ tarif Pelayanan	3,00		NIHIL	
5	Standar Pelayanan	2,00			
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan	2,00			
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan	1,00			
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	2,00			
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (sarana dan masukan perbaikan)	2,00			
	Total Bobot/ Rata - rata	20			

C. Analisis

-

IV. KESIMPULAN

1. Nilai IPAK & IPKP bulan JANUARI tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indeks	Capaian		
	Nilai	Nilai Interval Konversi	Kinerja
IPAK	-	-	-
IPKP	-	-	-

LAPORAN SURVEI IPAK & IPKP BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, maka dalam rangka menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, maka dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka penyelenggara layanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui **Survey Kepuasan Layanan/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)** dan **Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani. DPKP merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat terkait pelayanan di lingkungannya. ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

II. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Anti Korupsi meliputi :

No.	Variabel
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin
2	Praktek Percaloan
3	Diskrimasi dalam pelayanan
4	Praktek pungli
5	Mal-administrasi

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

B. Hasil Survei

NO	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPAK	Kinerja
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin	3,00			
2	Praktek Percaloan	3,00			
3	Diskriminasi dalam pelayanan	3,00		NIHIL	
4	Praktek pungli	3,00			
5	Mal-administrasi	3,00			
	Total Bobot / Rata-rata	15,00			

C. Analisis

-

III. INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Kualitas Pelayanan meliputi :

No	Variabel
1	Persyaratan Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Waktu dalam Pelayanan
4	Biaya/ tarif Pelayanan
5	Standar Pelayanan
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Hasil Survei

No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPKP	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,00			
2	Prosedur Pelayanan	3,00			
3	Waktu dalam Pelayanan	2,00			
4	Biaya/ tarif Pelayanan	3,00		NIHIL	
5	Standar Pelayanan	2,00			
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan	2,00			
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan	1,00			
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	2,00			
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)	2,00			
	Total Bobot/ Rata - rata	20			

C. Analisis

-

IV. KESIMPULAN

1. Nilai IPAK & IPKP bulan FEBRUARI tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indeks	Capaian		
	Nilai	Nilai Interval Konversi	Kinerja
IPAK	-	-	-
IPKP	-	-	-

LAPORAN SURVEI IPAK & IPKP BULAN MARET TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, maka dalam rangka menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, maka dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka penyelenggara layanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui **Survey Kepuasan Layanan/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)** dan **Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani. DPKP merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat terkait pelayanan di lingkungannya. ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

II. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Anti Korupsi meliputi :

No.	Variabel
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin
2	Praktek Percaloan
3	Diskrimasi dalam pelayanan
4	Praktek pungli
5	Mal-administrasi

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

B. Hasil Survei

NO	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPAK	Kinerja
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin	3,00	4,875	97,50	Bersih dari Korupsi
2	Praktek Percaloan	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
3	Diskriminasi dalam pelayanan	3,00	4,750	95,00	Bersih dari Korupsi
4	Praktek pungli	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
5	Mal-administrasi	3,00	4,750	95,00	Bersih dari Korupsi
	Total Bobot / Rata-rata	15,00	4,875	97,50	Bersih dari Korupsi

C. Analisis

1. Nilai IPAK pada bulan **Maret 2024** yaitu sebesar **97,50**, kategori kinerja **“Bersih dari Korupsi”**
2. Analisa pada data IPAK secara keseluruhan yang meliputi seluruh unit pelayanan di DPKP diperoleh 3 nilai terendah yang harus dianalisa untuk peningkatan kinerja meliputi unsur-unsur:
 - a. Diskriminasi dalam pelayanan dengan nilai 95,00, kategori kinerja Bersih dari Korupsi
 - b. Mal-administrasi dengan nilai 95,00, kategori kinerja Bersih dari Korupsi
 - c. Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin dengan nilai 97,50, kategori kinerja Bersih dari Korupsi
3. Jumlah Responden sebanyak **8** responden dengan mencakup seluruh masyarakat pengguna layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor.

III. INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Kualitas Pelayanan meliputi :

No	Variabel
1	Persyaratan Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Waktu dalam Pelayanan
4	Biaya/ tarif Pelayanan
5	Standar Pelayanan
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Hasil Survei

No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPKP	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,00	4,250	85,00	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,00	4,750	95,00	Sangat Baik
3	Waktu dalam Pelayanan	2,00	4,750	95,00	Sangat Baik
4	Biaya/ tarif Pelayanan	3,00	4,875	97,50	Sangat Baik
5	Standar Pelayanan	2,00	4,625	92,50	Sangat Baik
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan	2,00	4,625	92,50	Sangat Baik
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan	1,00	4,750	95,00	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	2,00	4,500	90,00	Sangat Baik
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)	2,00	4,500	90,00	Sangat Baik
	Total Bobot/ Rata - rata	20	4,625	92,50	Sangat Baik

C. Analisis

1. Nilai **IPKP** pada bulan **Maret 2024** yaitu sebesar **92,50**, kategori kinerja **“Sangat Baik”**
2. Tiga nilai terendah yang harus segera dianalisa dan ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja meliputi unsur-unsur:
 - a. Persyaratan Pelayanan sebesar 85,00 dengan kategori kinerja **“Baik”**.
 - b. Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan sebesar 90,00 dengan kategori kinerja **“Sangat Baik”**.
 - c. Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan) sebesar 90,00 dengan kategori kinerja **“Sangat Baik”**.
4. Jumlah sebanyak 8 orang dengan mencakup seluruh masyarakat pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan.

IV. KESIMPULAN

1. Nilai IPAK & IPKP bulan Agustus tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indeks	Capaian		
	Nilai	Nilai Interval Konversi	Kinerja
IPAK	4,875	97,50	Bersih dari Korupsi
IPKP	4,625	92,50	Sangat Baik

LAPORAN SURVEI IPAK & IPKP BULAN APRIL TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, maka dalam rangka menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, maka dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka penyelenggara layanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui **Survey Kepuasan Layanan/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)** dan **Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani. DPKP merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat terkait pelayanan di lingkungannya. ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

II. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Anti Korupsi meliputi :

No.	Variabel
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin
2	Praktek Percaloan
3	Diskrimasi dalam pelayanan
4	Praktek pungli
5	Mal-administrasi

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

B. Hasil Survei

NO	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPAK	Kinerja
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
2	Praktek Percaloan	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
3	Diskriminasi dalam pelayanan	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
4	Praktek pungli	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
5	Mal-administrasi	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
	Total Bobot / Rata-rata	15,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi

C. Analisis

1. Nilai IPAK pada bulan **APRIL 2024** yaitu sebesar **100,00**, kategori kinerja **“Bersih dari Korupsi”**
2. Analisa pada data IPAK secara keseluruhan yang meliputi seluruh unit pelayanan di DPKP **TIDAK** diperoleh nilai terendah yang harus dianalisa untuk peningkatan kinerja.
3. Jumlah Responden sebanyak **10** responden dengan mencakup seluruh masyarakat pengguna layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor.

III. INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Kualitas Pelayanan meliputi :

No	Variabel
1	Persyaratan Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Waktu dalam Pelayanan
4	Biaya/ tarif Pelayanan
5	Standar Pelayanan
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Hasil Survei

No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPKP	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,00	4,500	90,00	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,00	4,900	98,00	Sangat Baik
3	Waktu dalam Pelayanan	2,00	4,600	92,00	Sangat Baik
4	Biaya/ tarif Pelayanan	3,00	5,000	100,00	Sangat Baik
5	Standar Pelayanan	2,00	5,000	100,00	Sangat Baik
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan	2,00	5,000	100,00	Sangat Baik
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan	1,00	5,000	100,00	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	2,00	4,700	94,00	Sangat Baik
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)	2,00	4,900	98,00	Sangat Baik
	Total Bobot/ Rata - rata	20	4,844	96,88	Sangat Baik

C. Analisis

1. Nilai **IPKP** pada bulan **APRIL 2024** yaitu sebesar **96,88%**, kategori kinerja **“Sangat Baik”**
2. Tiga nilai terendah yang harus segera dianalisa dan ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja meliputi unsur-unsur:
 - a. Persyaratan Pelayanan sebesar 90,00 dengan kategori kinerja **“Sangat Baik Baik”**.
 - b. Waktu dalam Pelayanan sebesar 92,00 dengan kategori kinerja **“Sangat Baik”**.
 - c. Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan sebesar 94,00 dengan kategori kinerja **“Sangat Baik”**.
4. Jumlah sebanyak **10** orang dengan mencakup seluruh masyarakat pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan.

IV. KESIMPULAN

1. Nilai IPAK & IPKP bulan APRIL tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indeks	Capaian		
	Nilai	Nilai Interval Konversi	Kinerja
IPAK	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
IPKP	4,844	96,88	Sangat Baik

LAPORAN SURVEI IPAK & IPKP BULAN **MEI** TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, maka dalam rangka menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, maka dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka penyelenggara layanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui **Survey Kepuasan Layanan/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)** dan **Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani. DPKP merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat terkait pelayanan di lingkungannya. ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

II. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Anti Korupsi meliputi :

No.	Variabel
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin
2	Praktek Percaloan
3	Diskrimasi dalam pelayanan
4	Praktek pungli
5	Mal-administrasi

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

B. Hasil Survei

NO	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPAK	Kinerja
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
2	Praktek Percaloan	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
3	Diskriminasi dalam pelayanan	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
4	Praktek pungli	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
5	Mal-administrasi	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
	Total Bobot / Rata-rata	15,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi

C. Analisis

1. Nilai IPAK pada bulan **MEI 2024** yaitu sebesar **100,00**, kategori kinerja **“Bersih dari Korupsi”**
2. Analisa pada data IPAK secara keseluruhan yang meliputi seluruh unit pelayanan di DPKP **TIDAK** diperoleh 3 nilai terendah yang harus dianalisa untuk peningkatan kinerja.
3. Jumlah Responden sebanyak **5** responden dengan mencakup seluruh masyarakat pengguna layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor.

III. INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Kualitas Pelayanan meliputi :

No	Variabel
1	Persyaratan Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Waktu dalam Pelayanan
4	Biaya/ tarif Pelayanan
5	Standar Pelayanan
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Hasil Survei

No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPKP	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,00	5,000	100,00	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,00	5,000	100,00	Sangat Baik
3	Waktu dalam Pelayanan	2,00	5,000	100,00	Sangat Baik
4	Biaya/ tarif Pelayanan	3,00	5,000	100,00	Sangat Baik
5	Standar Pelayanan	2,00	5,000	100,00	Sangat Baik
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan	2,00	5,000	100,00	Sangat Baik
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan	1,00	5,000	100,00	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	2,00	4,800	96,00	Sangat Baik
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)	2,00	5,000	100,00	Sangat Baik
	Total Bobot/ Rata - rata	20	4,977	99,55	Sangat Baik

C. Analisis

1. Nilai IPKP pada bulan MEI 2024 yaitu sebesar 99,55, kategori kinerja “Sangat Baik”
2. nilai terendah yang harus segera dianalisa dan ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja meliputi unsur-unsur:
 - a. Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan sebesar 96,00 dengan kategori kinerja “Sangat Baik”
4. Jumlah sebanyak 5 orang dengan mencakup seluruh masyarakat pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan.

IV. KESIMPULAN

1. Nilai IPAK & IPKP bulan Agustus tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indeks	Capaian		
	Nilai	Nilai Interval Konversi	Kinerja
IPAK	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
IPKP	4,977	99,55	Sangat Baik

LAPORAN SURVEI IPAK & IPKP BULAN JUNI TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, maka dalam rangka menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, maka dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka penyelenggara layanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui **Survey Kepuasan Layanan/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)** dan **Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani. DPKP merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat terkait pelayanan di lingkungannya. ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

II. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Anti Korupsi meliputi :

No.	Variabel
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin
2	Praktek Percaloan
3	Diskrimasi dalam pelayanan
4	Praktek pungli
5	Mal-administrasi

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

B. Hasil Survei

NO	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPAK	Kinerja
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
2	Praktek Percaloan	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
3	Diskriminasi dalam pelayanan	3,00	4,500	90,00	Bersih dari Korupsi
4	Praktek pungli	3,00	5,000	100,00	Bersih dari Korupsi
5	Mal-administrasi	3,00	4,500	90,00	Bersih dari Korupsi
	Total Bobot / Rata-rata	15,00	4,800	96,50	Bersih dari Korupsi

C. Analisis

1. Nilai IPAK pada bulan **JUNI 2024** yaitu sebesar **96,50**, kategori kinerja **“Bersih dari Korupsi”**
2. Analisa pada data IPAK secara keseluruhan yang meliputi seluruh unit pelayanan di DPKP diperoleh 2 nilai terendah yang harus dianalisa untuk peningkatan kinerja meliputi unsur-unsur:
 - a. Diskriminasi dalam pelayanan dengan nilai 90,00, kategori kinerja Bersih dari Korupsi
 - b. Mal-administrasi dengan nilai 90,00, kategori kinerja Bersih dari Korupsi
3. Jumlah Responden sebanyak **2** responden dengan mencakup seluruh masyarakat pengguna layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor.

III. INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Kualitas Pelayanan meliputi :

No	Variabel
1	Persyaratan Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Waktu dalam Pelayanan
4	Biaya/ tarif Pelayanan

5	Standar Pelayanan
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Hasil Survei

No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPKP	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,00	5,000	100,00	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,00	5,000	100,00	Sangat Baik
3	Waktu dalam Pelayanan	2,00	4,500	90,00	Sangat Baik
4	Biaya/ tarif Pelayanan	3,00	5,000	100,00	Sangat Baik
5	Standar Pelayanan	2,00	4,500	90,00	Sangat Baik
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan	2,00	5,000	100,00	Sangat Baik
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan	1,00	5,000	100,00	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	2,00	4,000	80,00	Sangat Baik
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)	2,00	4,000	80,00	Sangat Baik
	Total Bobot/ Rata - rata	20	4,666	93,33	Sangat Baik

C. Analisis

1. Nilai IPKP pada bulan **Juni 2024** yaitu sebesar **93,33**, kategori kinerja **“Sangat Baik”**
2. Tiga nilai terendah yang harus segera dianalisa dan ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja meliputi unsur-unsur:
 - a. Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan sebesar 80,00 dengan kategori kinerja **“Sangat Baik”**.
 - b. Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan) sebesar 80,00 dengan kategori kinerja **“Sangat Baik”**.

- c. Waktu dalam Pelayanan sebesar 90,00 dengan kategori kinerja “Sangat Baik”
- 4. Jumlah sebanyak 2 orang dengan mencakup seluruh masyarakat pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan.

IV. KESIMPULAN

- 1. Nilai IPAK & IPKP bulan Juni tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indeks	Capaian		
	Nilai	Nilai Interval Konversi	Kinerja
IPAK	4,800	96,50	Bersih dari Korupsi
IPKP	4,666	93,33	Sangat Baik

LAPORAN SURVEI IPAK & IPKP BULAN JULI TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, maka dalam rangka menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, maka dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka penyelenggara layanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui **Survey Kepuasan Layanan/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)** dan **Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani. DPKP merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat terkait pelayanan di lingkungannya. ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

II. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Anti Korupsi meliputi :

No.	Variabel
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin
2	Praktek Percaloan
3	Diskrimasi dalam pelayanan
4	Praktek pungli
5	Mal-administrasi

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

B. Hasil Survei

NO	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPAK	Kinerja
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin	3,00			
2	Praktek Percaloan	3,00			
3	Diskriminasi dalam pelayanan	3,00		NIHIL	
4	Praktek pungli	3,00			
5	Mal-administrasi	3,00			
	Total Bobot / Rata-rata	15,00			

C. Analisis

-

III. INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Kualitas Pelayanan meliputi :

No	Variabel
1	Persyaratan Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Waktu dalam Pelayanan
4	Biaya/ tarif Pelayanan
5	Standar Pelayanan
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Hasil Survei

No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPKP	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,00			
2	Prosedur Pelayanan	3,00			
3	Waktu dalam Pelayanan	2,00			
4	Biaya/ tarif Pelayanan	3,00		NIHIL	
5	Standar Pelayanan	2,00			
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan	2,00			
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan	1,00			
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	2,00			
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)	2,00			
	Total Bobot/ Rata - rata	20			

C. Analisis

-

IV. KESIMPULAN

1. Nilai IPAK & IPKP bulan JULI tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indeks	Capaian		
	Nilai	Nilai Interval Konversi	Kinerja
IPAK	-	-	-
IPKP	-	-	-

LAPORAN SURVEI IPAK & IPKP BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, maka dalam rangka menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, maka dalam rangka menuju Zona Integritas (ZI) serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka penyelenggara layanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui **Survey Kepuasan Layanan/ Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)** dan **Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani. DPKP merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat terkait pelayanan di lingkungannya. ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

II. INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Anti Korupsi meliputi :

No.	Variabel
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin
2	Praktek Percaloan
3	Diskrimasi dalam pelayanan
4	Praktek pungli
5	Mal-administrasi

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi

B. Hasil Survei

NO	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPAK	Kinerja
1	Kebiasaan Gratifikasi dan uang pelicin	3,00			
2	Praktek Percaloan	3,00			
3	Diskriminasi dalam pelayanan	3,00		NIHIL	
4	Praktek pungli	3,00			
5	Mal-administrasi	3,00			
	Total Bobot / Rata-rata	15,00			

C. Analisis

-

III. INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)

A. Pengertian

Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei Persepsi Kualitas Pelayanan meliputi :

No	Variabel
1	Persyaratan Pelayanan
2	Prosedur Pelayanan
3	Waktu dalam Pelayanan
4	Biaya/ tarif Pelayanan
5	Standar Pelayanan
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

B. Hasil Survei

No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Interval Konversi IPKP	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,00			
2	Prosedur Pelayanan	3,00			
3	Waktu dalam Pelayanan	2,00			
4	Biaya/ tarif Pelayanan	3,00		NIHIL	
5	Standar Pelayanan	2,00			
6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas Pelayanan	2,00			
7	Perilaku Petugas terkait kesopanan dan keramahan	1,00			
8	Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	2,00			
9	Tata Kelola Penanganan Pengaduan (saran dan masukan perbaikan)	2,00			
	Total Bobot/ Rata - rata	20			

C. Analisis

-

IV. KESIMPULAN

1. Nilai IPAK & IPKP bulan AGUSTUS tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indeks	Capaian		
	Nilai	Nilai Interval Konversi	Kinerja
IPAK	-	-	-
IPKP	-	-	-